

Tabel 3.1
Identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi pelayanan
Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	eksternal	
Kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rangkap Jabatan Fungsional Umum 2. Sumber Daya Manusia Tidak Sesuai Anjab 	UU ASN		1. Adanya moratorium pegawai	Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah
Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya pelanggaran perda perijinan, Masalah Pekat Kurang Tenaga pengamanan wilayah Dan Keamanan Lingkungan 2. Regulasi Pelimpahan Kewenangan 	Perda perijinan, perda retribusi, Perda pelimpahan kewenangan	Kurang sosialisasi Perda	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurang kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan 2. masih banyak Pelaku kriminalitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurang sosialisasi perda kepada masyarakat 2. Pelaksanaan tugas tidak optimal karena rangkap jabatan 3. Kegiatan yang Dilaksanakan blm ada Juknis, Juklak
Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	1. standar sarana dan prasarana pelayanan Public belum memenuhi	1. peraturan Ttg pelayanan publik, SOP	1. kondisi kantor kurang memadai	1. Tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi	Standar pelayanan public belum memenuhi standar pelayanan

	<p>2 media informasi kepada masyarakat terbatas</p> <p>3. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan belum maksimal</p> <p>4. Penempatan tenaga Teknis Berkait pelayanan perizinan Belum cukup kompetensinya, sehingga Pelaksanaan Kurang Optimal</p>	2. UU keterbukaan informasi Public	2. Kemampuan di bidang IT terbatas	2. Keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dari pemerintah	
Pembinaan Sosial Budaya Kecamatan Batui Selatan	<p>1. masyarakat sangat menuntut fasilitasi dari pemerintah</p> <p>2. Partisipasi Masyarakat Terhadap pelaporan Rendah</p>	Perbup pelimpahan kewenangan, pagu indikatif	SDM dan anggaran yang terbatas	Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah	<p>Keterbatasan kewenangan kecamatan</p> <p>Keterlambatan laporan pertanggungjawaban dari masyarakat</p>
Penyelenggaraan Perekonomian pembangunan wilayah	Sarana Prasarana wilayah rusak	Perbup pelimpahan kewenangan	SDM dan anggaran yang terbatas	Tuntutan Masyarakat untuk Memperbaiki yang rusak	

Tabel 3.3
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
				2015	2019
1	2	3		4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa		Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang Berkualitas	1	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%
		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan Pilkada	< 10 %	< 10 %
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		2	Persentase kinerja pemerintahan pada daerah otonom baru (maksimal)	20 %	70%
		3	Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 Perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah	45 %	70 %
		5	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan	1	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%

pembangunan daerah	2	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
	3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 provinsi	34 provinsi dan 204 kab/ kota
	4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
	5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
	6	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% provinsi 5% Kab/kota	100% provinsi 30% Kab/kota

1	2		3	4	5
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah		Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50 % berkinerja baik	70 % berkinerja baik
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat Waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		3	Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat Waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
		3	Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen Kependudukan	1	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang Akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	34 provinsi 514 Kab/kota
		2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	1	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk Mendukung	269 daerah	541 daerah

10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 – 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)					Kondisi Akhir Renstra
				2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	85	90	95	100	100

7.2

Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang mengacu
Pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2017 -2021

No	Program	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)					Kondisi Akhir Renstra
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan kebutuhan adm perkantoran	90	95	98	99,9	100	100
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100	99,9	100	100	100	100
	Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS				98			100
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Disiplin ASN dilingkungan Kec. Batui Selatan		100		100	100	100
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Cakupan Layanan Kepegawaian		100	100	100	100	100
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	100	100	100	100	100	100
	Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,5	99,9	100	100	100	100